

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan yang baik bagi suatu organisasi dapat dicapai jika pengelolaan anggaran organisasi yang terlibat dilakukan secara transparan dan mudah dipahami. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi yang merupakan prinsip paling dasar dari pemerintahan yang baik. Akuntabilitas melibatkan pembentukan mekanisme untuk meyakinkan politisi dan pejabat pemerintah tentang tindakan mereka dalam mengelola sumber daya masyarakat.

Akuntabilitas juga berhubungan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya *Good Governance* dalam mengelola organisasi publik (Wahdaniyah, 2021). Adanya anggapan publik mengenai besarnya anggaran yang di anggarkan terkesan pemborosan yang menjadi dasar perlunya konsep *Value For Money* perlu dikaji lebih dalam lagi ketika melakukan perencanaan anggaran yaitu dengan mengutamakan efisiensi, ekonomi dan efektivitas. *Value For Money* merupakan komponen untuk pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik dan optimal disebut dengan *good governance* (Wahdaniyah, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas penting untuk diimplementasikan dalam perencanaan maupun realisasinya sehingga instansi pemerintah dituntut agar

setiap aktivitas yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi serta memperhatikan efisiensi, ekonomis dan hasil *output* yang dihasilkan dari segala aktivitas haruslah benar-benar efektif pelaksanaannya (Aulia & Fuadi, 2022). Menurut Kurniawan (2013) kinerja sektor publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan transparansi, oleh karena itu untuk mencapai hasil yang maksimal, transparansi dan akuntabilitas serta *value for money* haruslah memaksimalkan implementasinya.

Sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi terutama dalam menggunakan belanja khususnya belanja langsung (Mardiasmo, 2018). Penerapan prinsip *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for Money* adalah inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah (Mardiasmo, 2018). Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai *output* yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan berita pada situs papuabangkit.com yang dijelaskan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahwa hasil pemantauan tindak lanjut periode Semester II Tahun 2022 bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang dalam laporan keuangannya dengan jumlah rekomendasi sebanyak 793 rekomendasi, terdapat sebanyak 508 (64,06%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai

rekomendasi. Dengan demikian, maka BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal tersebut tentunya masih dianggap belum sempurna akan tetapi telah mengalami peningkatan karena mengingat pada periode sebelumnya yakni laporan keuangan 2020 mendapat opini *disclaimer* sehingga pada periode laporan 2021 terjadi peningkatan meskipun hanya mencapai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan begitu, diharapkan kedepannya Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, agar mampu menyajikan laporan keuangan yang semakin baik di masa mendatang (Papuabangkit.com).

Selanjutnya terkait transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan yang terjadi di Provinsi Papua diketahui bahwa beberapa daerah berada di kategori kurang transparan dan kurang akuntabel. Berdasarkan data dari organisasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada tahun 2021 menjelaskan bahwa informasi tersebut mencakup tentang Aspek Akuntabilitas dan Transparansi di delapan daerah Provinsi Papua yang mana menunjukkan indeks akuntabilitas daerah masih berada dalam kategori tidak akuntabel (0-0,25) dan kurang akuntabel (0,26-0,50), menurut penjelasan Pihak FITRA bahwa skor akuntabilitas paling tinggi hanya 0,27 (27%), yaitu Jayapura dan Merauke. Sementara enam daerah lainnya yaitu Pegunungan Bintang, Biak, Keerom, Kab. Jayapura 0,26 (26%), Sorong 0,20 (20%), Raja Ampat 0,17 (17%), Mimika, Nabire dan Puncak Jaya 0,12 (12%), Fak-Fak 0,10

(10%), dan Tambraw 0 (0%). Kemudian pada Aspek Transparansi di Papua Jayapura memiliki nilai kategori transparan yaitu 0,47 atau 47%, sementara Pegunungan Bintang dan Merauke nilainya 0,29 atau 29%. Selain itu, dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang dipublikasikan oleh Pemda Provinsi Papua masih terbatas sekali. Kemudian terkait informasi yang paling banyak disampaikan hanya berupa dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipublikasikan dalam format yang sangat terbatas (Maryono, 2021).

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan terdapat perbedaan atau gap hasil penelitian yaitu Sayuti dkk. (2018) menyatakan bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan dan dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi menggunakan sistem yang berbasis akrual, serta konsep *Value For Money* cukup ekonomis, efisien dan efektif.

Penelitian oleh Wahdaniyah (2021) menyatakan bahwa perwujudan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam proses pengelolaan akuntansi keuangan menggunakan sistem akuntansi

berbasis aktual, serta konsep *value for money* cukup ekonomis dan cukup efektif, akan tetapi masih kurang efisien.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sayuti dkk. (2018) yang meneliti terkait Penerapan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada objek yang mana Sayuti, dkk. (2018) melakukan penelitian di Kantor BAPPEDA Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan dalam penelitian ini fokus objek penelitian yaitu di Kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Kemudian dalam penelitian terdahulu tersebut periode pengamatan dilakukan sebanyak 5 (Lima) tahun, sehingga dalam penelitian ini dikembangkan menjadi 6 (Enam) tahun pengamatan atas periode laporan pengelolaan keuangannya. Alasan peneliti lebih memilih objek penelitian di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang karena saran dari salah satu pegawai yang bekerja di sana bahwa laporan-laporan keuangan dan sebagainya tersedia lengkap di instansi tersebut, kemudian adanya fenomena masalah terkait penilaian dari BPK berupa opini *Disclaimer* pada tahun 2020 dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2021 sehingga memperkuat alasan pentingnya dilakukan penelitian di objek tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait fenomena yang terjadi dan adanya gap pada penelitian terdahulu terkait penerapan nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *Value For Money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Penerapan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep *Value For Money* Dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA di Kabupaten Pegunungan Bintang)”**.

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas serta konsep *Value For Money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada Kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka akan dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan dengan baik?
2. Apakah penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan dengan baik?
3. Apakah penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang telah dilakukan dengan baik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka akan dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang.
3. Untuk menganalisis penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan sektor publik pada kantor BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu dan teori serta ide terkait topik penelitian pengelolaan keuangan bagi pihak akademis, pembaca dan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah maupun pihak perusahaan dan institusi lainnya yang menjalankan praktek pengelolaan keuangan agar dapat memperbaiki kinerja keuangan tersebut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang landasan teori, kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang diteliti penulis dan mendasari analisis yang digunakan untuk penyusunan Bab IV yaitu pembahasan yang diambil dari berbagai literatur.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang variabel penelitian baik itu variabel independen maupun variabel dependen yang akan di ambil dari definisi operasional tentang semua variabel yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, beserta analisis pengujian dan data penelitian yang di dukung dengan hasil wawancara secara tertulis.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan, dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini.